

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan daerah pada umumnya diarahkan pada peran kegiatan sosial dan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pendapatan asli daerah. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pengembangan destinasi pariwisata perlu diimbangi dengan adanya pemberdayaan masyarakat daerah sekitar wisata. Hal ini menjadi sangat wajar dikarenakan daerah wisata menjadi pilihan utama wisatawan lokal maupun manca negara. Bahkan pada era globalisasi saat ini, daerah wisata telah berkembang pesat menjadi primadona wisatawan meski hanya untuk sekedar menghabiskan waktu luang.<sup>1</sup>

Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlakukan untuk menunjang industri wisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan

---

<sup>1</sup> Bima, *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Daerah Wisata Pantai Bandengan di kabupaten Jepara*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2017, h 14

kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mata rantai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja.

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, Sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Dalam hal ini industri pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari objek itu sendiri sesuai dengan tujuan pengelolaan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang beranekaragam.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) tentang kepariwisataan, berbunyi:

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan adanya pariwisata akan lebih

mengenal bangsa, kebudayaan, adat-istiadat dan sekaligus dapat menikmati keindahan alam.<sup>2</sup>

Pengelolaan pariwisata memiliki kekuatan penggerak perekonomian yang sangat luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, namun yang lebih penting lagi adalah pengembangan pariwisata yang mampu membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa.

Peranan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata di Kota Bengkulu memang dinilai masih tidak tertata, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana-prasarana yang belum sepenuhnya mendukung.

Sayangnya infrastruktur dan sarana-prasarana belum memadai untuk wisata di Kota Bengkulu, yang mana wisata dipantai panjang belum banyak disediakan tempat istirahat yang memadai, tempat sampah yang kurang, kebersihan yang kurang terjaga, tempat ibadah yang kurang serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnyayang kurang. Perlu untuk diketahui kegiatankegiatan wisata yang ada di Kota Bengkulu antara lain:

1. Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu
2. Wisata Danau Dendam Tak Sudah
3. Wisata Pasir Putih
4. Wisata Pantai Dan Hutan Mangrove Pulau Baai

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

5. Wisata Pulau Kumayan
6. Wisata Napak Tilas Sejarah Pendudukan Inggris Raya Di Bengkulu, Fort Marlborough
7. Wisata Pulau Tikus

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan objek wisata secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses pengelolaan di atas maka salah satu tugas penting pemerintah Kota Bengkulu adalah berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di Kota Bengkulu. Oleh karena itu sangat perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana dari pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata kedepannya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke

dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:<sup>3</sup>

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pariwisata;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata;

Kota Bengkulu memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan kuliner khas yang tidak kalah dengan daerah lain, sehingga pemerintah Kota Bengkulu menjadikan sektor ini sebagai primadona meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Posisi sektor pariwisata Kota Bengkulu sangat penting sebagai salah satu bisnis di Kota Bengkulu. Dengan penetapan pariwisata sebagai salah satu bisnis, perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

---

<sup>3</sup> Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu 2019-2023, h 15

Seperti yang diketahui bahwa visi pemerintah Kota Bengkulu salah satunya yaitu: “Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha Yang Kondusif”, dengan sasaran daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana peran Dinas Pariwisata dalam mewujudkan sasaran ini dengan melakukan program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan Kemitraan.

Program-program ini ditujukan untuk mendukung misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dimana dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata (meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal) maka akan memberikan dampak/efek peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Kota Bengkulu.<sup>4</sup>

Keunggulan sektor pariwisata dalam konteks regional Bengkulu ditunjukkan pula dengan posisi sektor pariwisata di Kota Bengkulu. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa wilayah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, beberapa wilayah lainnya belum menjadi sektor pariwisata sebagai sektor unggulan namun merupakan salah satu sumber pendapatan walaupun kontribusi masih kecil. Tujuan pengelolaan pariwisata Kota Bengkulu adalah menjadikan pariwisata sebagai bagian dalam mewujudkan dan mengisi pola pembangunan pariwisata nasional, dan salah satu kegiatan ekonomi serta sumber pendapatan daerah. Tujuan pengelolaan pariwisata yang telah ditetapkan ini diharapkan dapat

---

<sup>4</sup> Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu 2019-2023, h 30

memacu perkembangan pariwisata di Kota Bengkulu. Pariwisata di Kota Bengkulu sudah menjadi salah satu kegiatan ekonomi daerah, walaupun sebagian besar belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Dalam pembahasan hukum Islam terdapat ayat al-quran mengenai pembahasan pariwisata, yaitu surat al-rum ayat 41 yang berbunyi:<sup>5</sup>

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh-Nya. Penegasan Allah SWT bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya dan mau kembali kepada jalan yang benar yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan baik. Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya.

---

<sup>5</sup> Surat Ar-Rum Ayat 41

Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam dan jangan sampai dirusak. Manusia juga diperbolehkan untuk menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkannya sebagai bekal ibadah kepada Allah SWT dan beramal shalih. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus (yang berlebihan) sehingga pelestarian alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi mengurangnya minat para pengunjung untuk berwisata di tempat wisata tersebut, dan masih banyak kerugian-kerugian yang didapatkan apabila ekosistem dan pengelolaan pariwisata tidak terelokasikan dengan baik.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul Tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Bengkulu

---

<sup>6</sup> Miftahul Ulum, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Pariwisata Laut*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung 2019, h 28

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu).

##### 2. Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu).

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan

penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi Astri Yuliyanti dengan judul Peran Dinas Pariwisata Kota Palngkaraya Dalam Membina Kelompok Sadar Wisata Di Kereng Bangkirai, skripsi IAIN Palngka Raya Fakultas Syariah dan Ekonomim Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2021, skripsi ini membahas tentang Dinas Pariwisata seharusnya melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan yang akan membuat kemampuan kreatif, inovatif dan mengantarkan pada kemandirian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengembangkan daerah kawasan wisata Kereng Bangkirai sehingga menjadi lebih maksimal. Perlu adanya sumber pendanaan yang jelas bagi Pokdarwis baik dalam bentuk upah maupun uang pembinaan sehingga masyarakat yang diberdayakan tersebut dapat menjalankan tugasnya dalam menjaga kebersihan dan keamanan dengan baik. Sebagai yang membina Pokdarwis, sudah semestinya Dinas Pariwisata memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban mempertimbangkan hal tersebut. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu, (1) Peran Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya dalam membina Kelompok Sadar Wisata di Kereng Bangkirai; (2) Dampak ekonomi bagi Kelompok Sadar Wisata di Kereng Bangkirai dengan adanya pembinaan dari Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan selama dua bulan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata yang berjumlah 4 orang, serta 3 orang informan yaitu anggota Kelompok Sadar Wisata di Kereng Bangkirai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga dilakukan dengan analisis teoritik yang mendalam dengan teori peran, pembinaan, pariwisata, dampak ekonomi dan ekonomi Islam.

Perbedaanya antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih memfokuskan kepada melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan yang akan membuat kemampuan kreatif, inovatif dan mengantarkan pada kemandirian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengembangkan daerah kawasan wisata Kereng Bangkirai sehingga menjadi lebih maksimal. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Peran Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Dalam Pengembangan Daerah Wisata Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

Persamaanya antara penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

2. Skripsi Meri Andani dengan judul Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Pengembangan Wisata Religi Di Masjid Al-Ihsaniyah

Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi 2022, skripsi ini membahas tentang Pertama, Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sejauh ini sudah terealisasi dengan baik hanya saja masih perlu optimalisasi dalam pelaksanaannya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memang harus ada semacam regulasi yang menjadikan Masjid Al-Ihsaniyah ini sebagai objek dari program kerja pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Kedua, kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengkapitalisasi wisata religi di Masjid Al-Ihsaniyah, kurangnya pengetahuan masyarakat betapa pentingnya dilakukannya pengembangan wisata religi di Masjid Al-Ihsaniyah, perencanaan yang matang juga kurang dalam melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur aksesibilitas sehingga terjadinya kemerosotan dan kekurangan anggaran dalam melakukan pengembangannya. Ketiga, upaya pengembangan Masjid Al-Ihsaniyah sebagai salah satu wisata religi di Kota Jambi sudah baik yaitu dinas pariwisata telah menyiapkan anggaran dan melaksanakan event haul akbar Habib Syayid Idrus bin Hasan Al-Jufri dengan gelar Pangeran Wiro Kusumo secara rutin dan telah menjadi agenda tahunan di Kota Jambi, mengembangkan objek wisata dan daya tarik wisata melalui strategi pengembangan dalam promosi dan

pemasaran wisata, pengembangan sarana dan prasarana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai peran, kendala, dan upaya pengembangan Masjid Al-Ihsaniyah Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi sebagai salah satu objek wisata religi di Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penulis lebih membahas tentang Peran Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Dalam Pengembangan Daerah Wisata Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

Persamaanya antara penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

3. Jurnal Madona Marampa, Marthen Kinbal, Ronny Gosal dengan judul Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Ke'te Kesu di Kabupaten Toraja Utara, jurnal eksekutif Volume 2 Nomor 3 Tahun 2017, jurnal ini membahas peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, hasil penelitian menunjukkann bahwa Dari unsur perencanaan, pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup baik untuk lebih memajukan Objek Wisata yang ada di Ke"te Kesu".

Dari unsur pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada belum semua kelihatan apa yang sudah di lakukan, namun ada beberapa hal yang sudah di lakukan oleh pemerintah untuk kemajuan dari Objek Wisata yang ada di Ke“te Kesu. Akan tetapi masih ada saja keluhan dari para pengunjung, karena masih kurangnya lahan parkir dan infrastruktur berupa toilet serta akses jalan. Dari unsur pengeorganisasian, pemerintah Dinas Pariwisata sejauh penelitian di lakukan bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa staf untuk terjun langsung ke Objek Wisata, dan dari unsur Pengawasan, walaupun dari pemerintah sudah menurunkan langsung stafnya, masih ada saja keluhan dari pengunjung. Namun sejauh ini pemerintah telah menurunkan Satpol PP untuk membantu mengawasi lokasi Objek Wisata, apalagi dalam hari libur.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas tentang Karakter warga Toraja yang kondusif bagi kepariwisataan itu belum diimbangi dengan kepekaan pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir semua jalan menuju tempat objek wisata, yang selama ini menjadi tujuan wisatawan, tidak memadai. Ruas jalan pada umumnya masih berupa tanah dan bebatuan dengan lebar kurang dari 3 meter. Walaupun keadaan seperti itu belum sepenuhnya dibenahi pemerintah kabupaten Toraja Utara, namun kunjungan wisatawan ke Toraja Utara menurut Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, setiap tahunnya meningkat dapat dari pengunjung baik itu dalam negeri maupun luar negeri.dapat tercapai dengan baik. Sedangkan penulis lebih membahas tentang Peran Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Dalam Pengembangan Daerah Wisata Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

Persamaanya antara penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>8</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>7</sup> Madonna Marampa, Marthen Kimbal, Ronny Gosal, *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Ke'te Kesu di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Esekutif Volume 2 Nomor 3 Tahun 2017

<sup>8</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

## Kepariwisataan Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu).

### b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian pendekatan tertentu -hukum memerlukan pendekatan sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut<sup>9</sup>

- 1) *Statute* ) Undangan-Pendekatan Perundang  
(*Approach*)
- 2) (*Historical Approach*) Pendekatan Sejarah
- 3) *Comparative* ) Pendekatan Perbandingan  
(*Approach*)
- 4) *Conceptual* ) Pendekatan Konseptual  
(*Approach*)

pendekatan penelitian yang digunakan Adapun penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa -pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang Pendekatan ini dilakukan .(*Statute Approach*) Undangan Undangan -dengan cara mengkaji peraturan Perundang n dengan (isu hukum) permasalahan yang berhubunga Undangan -yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian Undang, -Undang Dasar dengan Undang-antara Undang -Undang yang satu dengan Undang-atau antara Undang .Undang yang lain<sup>10</sup>

Undangan adalah -endekatan PerundanganP pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

<sup>10</sup> ,...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP 24 h

undangan dan regulasi -ketentuan peraturan perundang yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dengan cara melakukan perbandingan dilakukan dengan peraturan yang berhubungan dengan -terhadap peraturan isu yang dihadapi yang telah di -tema/masalah dan isu .undangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa masih banyak pengelolaan pariwisata di Kota Bengkulu tidak terurus. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>11</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Tabel 1.1

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

No	Instansi/Masyarakat
1	Pemerintah daerah Kota Bengkulu
2	Dinas Pariwisata Kota Bengkulu
3	Tokoh Masyarakat

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat

---

<sup>12</sup> *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, ... h 181

tentang Peran Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Dalam Pengembangan Daerah Wisata Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

## 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah -buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan -prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi .tinggi<sup>13</sup>Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder :yang digunakan meliputi

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) .Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

## 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap :sekunder, yaitu bahan hukum primer dan

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus .hukum
- 2) situs di Internet seperti ensiklopedia, -Situs wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema .Penelitian yang dikaji

## b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

### 1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti

---

<sup>13</sup> *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>14</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu).

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>16</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

<sup>16</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori Pemerintahan daerah, Konsep Peran dinas Pariwisata, Teori Pariwisata dalam hukum Islam.

**BAB III.** BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

**BAB IV.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Dalam Pengembangan Daerah Wisata Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

**BAB V.** Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.